

PELATIHAN PERENCANAAN PARTISIPATIF BAGI MASYARAKAT DALAM RANGKA PEMANFAATAN DANA DESA YANG EFEKTIF DAN EFISIEN DI DESA SEJARO SAKTI

**Dessy Adriani, Fachrurrozi Sjarkowie, Amruzie Minha,
Idham Alamsyah, dan M. Yazid**

Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Sriwijaya
Email: dessyadriani@fp.unsri.ac.id

DOI: doi.org/10.24071/altruism.2020.030107

Abstract

Village fund allocated by the government can be one to advance village development. In order to make the use of village funds more optimal, it is necessary to train both the community and the apparatus together on the techniques of arranging participatory planning, so that the perception of the community and village officials will be the same in utilizing village funds for the acceleration of development in the village to achieve better welfare. In order to increase the role of all levels of village communities, especially in optimizing the role of Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) in the use of village funds, it is necessary to introduce participatory rural appraisal (PRA) methods to villagers. The method to be used in this activity is the Participatory Rural Appraisal (PRA) method. Trainees will be given materials in the form of theory, simulation and practice. The trainees consisted of, community leaders, village officials, Karang Taruna Youth and study mothers. The number of participants in this activity is as many as 20 people. This activity will be monitored and accompanied so that the training participants can increase its capacity in participatory planning.

Keywords: Village Fund, Participatory Planning, Effective, Efficient

PENDAHULUAN

Berkaitan dengan aplikasi dana Keuangan Desa, maka ada banyak hal yang menjadi pertimbangan. Kondisi aktual di lapangan seharusnya menjadi penting sebagai data dasar untuk penyusunan program kegiatan. Di beberapa lokasi pedesaan di Sumatera Selatan, selama ini masih mengalami kesenjangan antara pembangunan fisik dan pembangunan manusia. Pada banyak lokasi yang diamati, pembangunan fisik di Desa terlaksana, tetapi pembangunan manusia pedesaan (kesehatan, pendidikan dan peningkatan keterampilan dasar terutama perencanaan) tidak terlaksana dengan baik. Hal ini terbukti hasil kunjungan lapangan di beberapa desa di Sumsel seperti: Desa Ulak Kembang-Pampangan, Desa Semuntul, Kawasan Terpadu Mandiri (KTM) Rambutan-Tanjung Lago, dan Desa Bitis-Gelumbang. Hasil survey awal menunjukkan bahwa kebanyakan dana Desa digunakan untuk pembangunan fisik dan belum pada pembangunan mutu modal manusia. Bahkan di beberapa lokasi menunjukkan terdapat kelompok masyarakat yang belum memahami tentang Dana Desa dan penggunaannya. Menurut masyarakat desa, penduduk yang mengetahui tentang Dana Desa dan alokasi penggunaannya hanya aparat pemerintahan dan tetua adat desa.

Ansari (2013); Bachrein (2010) menunjukkan Hasil analisis awal tersebut menunjukkan terdapat potensi konflik dalam Penggunaan Dana Desa. Hal ini dapat menyebabkan tidak terlaksananya pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tidak terlaksananya pembangunan secara komprehensif yang diamanatkan dengan adanya Dana Desa disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

1. Lemahnya kemampuan perencanaan di desa
2. Kurang berfungsinya peran pendamping desa yang disediakan Pemerintah Pusat.
3. Akuntabilitas penggunaan Dana Desa kurang maksimal
4. Pembangunan hanya fokus dibidang infrastruktur desa.

Berdasarkan uraian diatas agar pemanfaatan Dana Desa lebih optimal, maka perlu dilakukan pelatihan baik kepada masyarakat maupun aparat secara bersama-sama dalam mengidentifikasi kebutuhan dan persoalan utama di masyarakat, sehingga persepsi masyarakat maupun aparat desa akan sama dalam memanfaatkan Dana Desa bagi percepatan pembangunan di desa untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik.

Tujuan kegiatan ini adalah agar masyarakat diharapkan mampu mengetahui permasalahannya sendiri di lingkungannya, menilai potensi SDM dan SDA yang tersedia, dan merumuskan solusi yang paling menguntungkan, sehingga perencanaan yang mereka lakukan menjadi lebih baik dan penggunaan dana akan lebih terkontrol, karena perencanaan tersebut melibatkan semua komponen masyarakat.

Kabupaten Ogan Ilir adalah salah satu Kabupaten yang mengelontorkan Dana Desa yang dimulai dari tahun 2013, dikarenakan janji kampanye Calon kepala Daerah dan disamping itu juga karena dana bagi hasil Non-Migas cukup tinggi. Dana Desa yang digelontorkan berkisar 1 sd 1,5 milyar pertahun dengan harapan percepatan pembangunan di pedesaan lebih baik lagi agar kesejahteraan masyarakat segera tercapai, kemudian dilanjutkan dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Hal ini berarti untuk seluruh Indonesia telah berjalan kurang lebih dua tahun.

Selanjutnya dalam pelaksanaannya terjadi beberapa penyimpangan seperti laporan yang di terima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, tercatat selama Januari-Juni 2017, ada 459 laporan terkait dengan dana desa. Laporan itu disampaikan ke KPK melalui telepon, SMS, surat elektronik, atau datang langsung. Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengatakan laporan tersebut berasal dari sejumlah desa di Indonesia. Laporan dari masyarakat untuk dana desa Januari sampai Juni 2017 saja ada 459 dan umumnya terkait pengelolaan dana desa.

Prabowo (2014) menyampaikan dengan berbagai persoalan penggunaan Dana Desa di atas, maka geliat perekonomian perdesaan seringkali masih berjalan lambat dibanding pembangunan ekonomi perkotaan. Untuk itu, penataan ekonomi perdesaan perlu segera dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya desa secara optimal dengan cara yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan secara menyeluruh dan berkelanjutan dengan optimalisasi penggunaan Dana Desa. Untuk mencapainya, diperlukan dua pendekatan yaitu: (a) Kebutuhan masyarakat dalam melakukan upaya perubahan dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan; dan (b) *Political will* dan kemampuan pemerintah desa bersama masyarakat dalam mengimplementasikan perencanaan pembangunan yang sudah disusun (Rustiadi, 2001) dalam Bachrein (2010). Potensi sumber daya desa selama ini belum termanfaatkan secara optimal. Jika pun ada yang memanfaatkan, cenderung eksploitatif dan tidak mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan akibat eksploitasi sumber daya desa (Djohani, 1996; Prabowo, 2014).

Salah satu solusi penting yang mampu mendorong gerak ekonomi desa melalui pemanfaatan Dana Desa adalah mengembangkan potensi ekonomi bagi masyarakat desa. Pengembangan dana menawarkan solusi untuk mengurangi kemiskinan, migrasi penduduk, dan pengembangan lapangan kerja di desa. Kewirausahaan menjadi strategi dalam pengembangan dan pertumbuhan kesejahteraan masyarakat, dimana sumber daya dan fasilitas yang disediakan secara spontan oleh (komunitas) masyarakat desa untuk menuju perubahan kondisi sosial ekonomi perdesaan (Ansari, 2013).

Dalam rangka untuk meningkatkan peran semua lapisan masyarakat desa terutama dalam pengoptimaan penggunaan dana Desa dalam penggunaan dana Desa maka perlu dipandang untuk memperkenalkan Metode *Participatory Rural Appraisal (PRA)* kepada masyarakat desa/Metode yang akan digunakan dalam kegiatan ini adalah metode *Participatory Rural Appraisal (PRA)*. Peserta pelatihan akan diberikan materi dalam bentuk teori, simulasi dan praktek.

Pada intinya PRA adalah sekelompok pendekatan atau metode yang memungkinkan masyarakat desa untuk saling berbagi, meningkatkan, dan menganalisis pengetahuan mereka tentang kondisi dan kehidupan desa, serta membuat rencana dan tindakan nyata (Chambers,

1996; Beebe, 1996). Beberapa prinsip dasar yang harus dipenuhi dalam metode PRA anatar lain adalah: saling belajar dan berbagi pengalaman, keterlibatan semua anggota kelompok dan informasi, orang luar sebagai fasilitator, konsep triangulasi, serta optimalisasi hasil, orientasi praktis dan keberlanjutan program (Rochdyanto, 2000). Metode tersebut dipandang telah memiliki teknis-teknis yang dijabarkan cukup operasional dengan konsep bahwa keterlibatan masyarakat sangat diperlukan dalam seluruh kegiatan. Pendekatan PRA memang bercita-cita menjadikan masyarakat menjadi peneliti, perencana, dan pelaksana pembangunan dan bukan sekedar obyek pembangunan. Tekanan aspek penelitian bukan pada validitas data yang diperoleh, namun pada nilai praktis untuk pengembangan program itu sendiri (Gitosaputro, 2006). Penerapan pendekatan dan teknik PRA dapat memberi peluang yang lebih besar dan lebih terarah untuk melibatkan masyarakat. Selain itu melalui pendekatan PRA akan dapat dicapai kesesuaian dan ketepatangunaan program dengan kebutuhan masyarakat sehingga keberlanjutan (*sustainability*) program dapat terjamin (Moeliono dan Djohani, 1996)

METODE PELAKSANAAN

Model kegiatan pengabdian adalah Teknik Pendampingan. Pendampingan adalah model kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dilakukan untuk kegiatan penyuluhan disertai dengan kegiatan pembinaan dan pengarahan pada sasaran. Disamping itu pelaksanaan juga berupa in-house training dengan memberikan teori dilanjutkan simulasi dan praktek.

Kegiatan ini menggunakan Metode *Participatory Rural Appraisal* (PRA). Teknik untuk menyusun dan mengembangkan program yang operasional dalam pembangunan desa. Metode ini ditempuh dengan memobilisasi sumberdaya manusia, alam setempat, lembaga lokal guna mempercepat peningkatan produktivitas, menstabilkan dan meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mampu pula melesetarkan sumber daya setempat. Metode ini menekankan adanya peran serta aktif dari masyarakat dalam merencanakan pembangunan (penyelesaian masalah) mulai dari pengenalan wilayah, pengidentifikasian masalah sampai penentuan skala prioritas. Luaran kegiatan ini adalah meningkatkan partisipasi seluruh lapisan masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah mereka. Target capaian kegiatan adalah tersedianya informasi terkait dengan perencanaan dan program kerja pemerintah desa yang lebih aplikatif terhadap konteks sosial, ekonomi, dan budaya serta kearifan lokal, sehingga memenuhi kebutuhan masyarakat;

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Metode *Participatory Rural Appraisal* (PRA)

Dalam rangka untuk meningkatkan peran semua lapisan masyarakat desa terutama dalam pengoptimaan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam penggunaan dana Desa maka perlu dipandang untuk memperkenalkan Metode *Participatory Rural Appraisal* (PRA) kepada masyarakat desa. Metode yang akan digunakan dalam kegiatan ini adalah metode *Participatory Rural Appraisal* (PRA). Peserta pelatihan akan diberikan materi dalam bentuk teori, simulasi dan praktek.

Metode PRA mulai menyebar dengan cepat pada tahun 1990-an yang merupakan bentuk pengembangan dari metode Pemahaman Cepat Kondisi Pedesaan (PCKP) atau Rapid Rural Appraisal (RPA) yang menyebar pada tahun 1980-an. Kedua metode tersebut saling berhubungan etar dan masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangannya dan bisa saling melengkapi. Namun dalam perkembangannya, metode PRA banyak digunakan dalam proses pelaksanaan program pembangunan secara partisipatif, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasannya (Mitchell, 1997).

Persiapan yang diperlukan untuk pelaksanaan pelatihan perencanaan secara partisipatif dengan metode PRA adalah menyiapkan bahan dan alat, karena pelatihan ini dil-

akukan secara simulasi dengan peralatan berupa karton manila, spidol dan penggaris. Agar proses pelatihan berjalan lancar.

2. Koordinasi dengan Mitra

Koordinasi lapangan ini dilakukan untuk menentukan waktu pelaksanaan kegiatan. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 20 September 2018. Berdasarkan hasil koordinasi lapangan tersebut, maka kegiatan pengabdian masyarakat tentang perencanaan partisipatif dilaksanakan pada tanggal 30 September 2019 dan 4 Oktober 2019.

3. Pelaksanaan Kegiatan

Tahapan kegiatan pengabdian dalam masyarakat adalah pelaksanaan kegiatan yaitu pada 30 September 2019. Kegiatan dilaksanakan di Kantor Kepala Desa Sejaru Sakti, mengingat ruangan cukup besar dan kegiatan dilakukan dalam bentuk FGD, ceramah dan simulasi. Rangkaian kegiatan adalah sebagai berikut:

Tahap ke-1

Kegiatan ini diawali dengan kegiatan Focus Discussion Group. Kegiatan FGD ini dilaksanakan pada tanggal 30 September 2019, berbarengan dengan kegiatan Rembuk Desa dalam rangka penyusunan program kerja tahun 2020. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan pemerintah kecamatan Gelumbang, Babinsa, Pendamping Desa, masyarakat dan ibu-ibu PKK. Kegiatan FGD dibimbing oleh yang disampaikan oleh Dr. Dessy Adriani, M.Si. Topik FGD diarahkan pada pentingnya perencanaan yang melibatkan lapisan masyarakat yang ada di Desa termasuk tokoh masyarakat, pemuka agama, kelompok ibu-ibu, karang taruna beserta perangkat desa.



Gambar 1. Kegiatan Rembuk Desa untuk Penyusunan Program Kerja Tahun 2020.

Hasil yang diharapkan dari proses perencanaan yang partisipatif akan menumbuhkan rasa memiliki yang tinggi bagi masyarakat, karena yang direncanakan merupakan kebutuhan dan bukan keinginan. Perencanaan partisipatif ini sangat penting untuk meningkatkan kapasitas masyarakat agar mereka dapat berperan dalam rangka mempercepat pembangunan di pedesaan yang bertujuan agar masyarakat adil dan sejahtera segera terwujud.

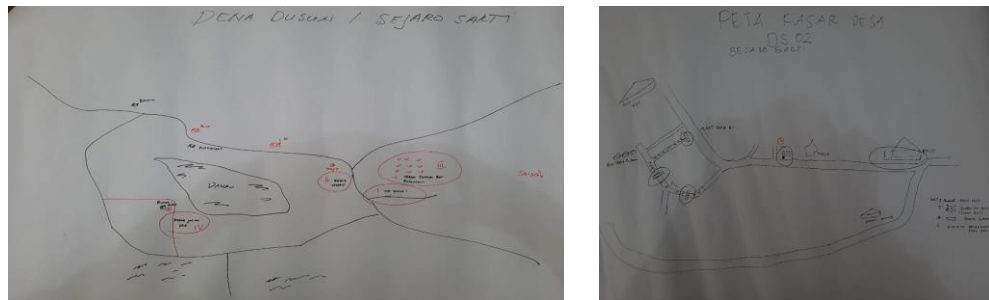
Tahap Ke-2

Pelatihan perencanaan partisipasi tersebut dilakukan berupa simulasi, dimana masyarakat yang hadir terdiri dari Kades dan perangkatnya, tokoh masyarakat kelompok ibu-ibu dan karang taruna dibagi 2 kelompok dan kegiatan ini dipandu oleh Dr. Dessy Adriani, S.P., M.Si. Dalam simulasi ini masing-masing kelompok menggunakan metode *land use mapping* dan diagram Venn. jembatan dimana, saluran air dimana, biasanya dengan metode ini masyarakat dengan mudah menggambarkan peta lokasi. Melalui metode ini, dapat dipetakan secara mudah dan tepat, program kerja yang dibutuhkan masyarakat untuk tahun 2020.



Gambar 2. Masyarakat Yang Didampingi oleh Instruktur Membuat *Land Use Mapping*

- a. Metode *Land use mapping* adalah kegiatan dimana kelompok diminta menggambarkan tata guna lahan di wilayah desa, seperti lokasi sawah dimana, pemukiman dimana, wilayah mereka, kegiatan ini didampingi oleh mahasiswa yang sedang praktek perencanaan wilayah di desa mereka. Hasilnya dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. *Land Use Mapping* hasil kerja kelompok

- b. Menggunakan Metode diagram Venn, dimana kelompok diminta untuk mendiskusikan permasalahan yang ada di desa dan dilanjutkan merankingnya atau mengurutkan mana yang paling penting untuk segera diselesaikan atau dibangun agar permasalahan tersebut cepat teratasi. Dengan menggunakan metode ini masyarakat akan terlatih untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi dan mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu, sehingga masalahnya tidak berlarut larut yang akibatnya kegiatan pembangunan menjadi terhambat. Untuk lebih jelasnya data dilihat pada Gambar 5



Gambar 4. Peserta Pelatihan yang didampingi oleh Instruktur dan mahasiswa sedang melakukan FGD dengan menggunakan diagram Venn

Jadi dalam pelatihan digunakan dua metodologi untuk merencanakan kegiatan secara partisipatif yaitu *land use mapping* dan diagram Venn dengan melalui FGD, sehingga as-

pirasi masyarakat yang mau bicara untuk mengungkapkan pendapatnya melalui oral dan yang agar malu-malu melalui penulisan di kertas plano. Dengan metode ini aspirasi masyarakat data terjaring dengan baik, tidak ada yang terlewatkan seperti disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Tahapan Kegiatan PRA

No.	Tahapan	Hasil Kegiatan
1.	Penjajakan kebutuhan (<i>need assessment</i>)	<p>Potensi</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Berada di wilayah perkantoran pemerintahan kabupaten Ogan lir. ● Jumlah penduduk di Desa Sejaro Sakti sebanyak 1.146 jiwa dengan 50,87% laki-laki dan 49,13% perempuan. ● Sebanyak 26,27 % penduduk tidak sekolah dan tidak tamat SD ● Penduduk Desa Sejaro Sakti memanfaatkan lahan rawa lebak dalam sebagai tempat penggembalaan ternak. Pada lahan rawa lebak dangkal dimanfaatkan sebagai lahan persawahan. Sedangkan lahan talang di desa ini dimanfaatkan sebagai perkebunan karet. <p>Permasalahan</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Berada di wilayah perkantoran pemerintahan kabupaten Ogan lir, tetapi masih sedikit mendapat perhatian ● Lahan sawah hanya bisa ditanami satu kali setahun ● Partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih terbatas karena keterbatasan pendidikan. ● Sarana prasarana produktif di desa masih kurang, misalnya infrastruktur jalan dan jembatan, pelayanan kesehatan dan pendidikan, persampahan, sanitasi, air bersih. ● Keterbatasan akses informasi dan modal usaha
2.	Perencanaan kegiatan/program	<ul style="list-style-type: none"> ● Perencanaan program/kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat merupakan proses yang dikembangkan dari perencanaan tingkat masyarakat (<i>bottom-up planning</i>) hasil FGD. ● Perencanaan kegiatan yang diajukan untuk tahun 2020 adalah: ● Dusun 1: (1) Perbaikan fasilitas pendidikan (Pemagaran Gedung PAUD), (2) Pembuatan sumber air bersih, (3) Pembuatan Gorong-gorong Desa, dan (4) Pengerasan jalan Desa ● Dusun 2: (1) Pembuatan system pompanisasi untuk lokasi cetak sawah baru, (2) Perbaikan system irigasi, (3) Pembuatan tempat sampah terpadu, (3) pembuatan jalan desa.
3.	Pelaksanaan kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> ● Pelaksanaan program kerja tahun 2020 dilaksanakan berdasarkan program pendampingan PPM dimana Staf dosen bekerja bersama kelompok-kelompok masyarakat. ● Dalam kegiatan pendampingan, metode/teknik PRA digunakan untuk mempermudah komunikasi saat diskusi.
4.	Monitoring kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> ● Dalam kegiatan pendampingan, metode/teknik PRA dapat untuk menganalisa perkembangan program. Misalnya, gambar kebun, kalender musim, transek, digunakan untuk memantau perkembangan kegiatan pengelolaan kebun.

4. Dana Desa dan Penggunaannya

Dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Selain itu pemerintah desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Peran besar yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan (Gambar 7). Bangunan yang telah dibangun menggunakan Dana Desa disajikan dalam Gambar 8.

PEKERJAAN DESA		PEMBAYARAN DESA	
1. 1.1.1. 7.385.000.000		1. 1.1.1. 7.385.000.000	
2. 1.1.1. 7.385.000.000		2. 1.1.1. 7.385.000.000	
3. 1.1.1. 7.385.000.000		3. 1.1.1. 7.385.000.000	
4. 1.1.1. 7.385.000.000		4. 1.1.1. 7.385.000.000	
5. 1.1.1. 7.385.000.000		5. 1.1.1. 7.385.000.000	
6. 1.1.1. 7.385.000.000		6. 1.1.1. 7.385.000.000	
7. 1.1.1. 7.385.000.000		7. 1.1.1. 7.385.000.000	
8. 1.1.1. 7.385.000.000		8. 1.1.1. 7.385.000.000	
9. 1.1.1. 7.385.000.000		9. 1.1.1. 7.385.000.000	
10. 1.1.1. 7.385.000.000		10. 1.1.1. 7.385.000.000	
11. 1.1.1. 7.385.000.000		11. 1.1.1. 7.385.000.000	
12. 1.1.1. 7.385.000.000		12. 1.1.1. 7.385.000.000	
13. 1.1.1. 7.385.000.000		13. 1.1.1. 7.385.000.000	
14. 1.1.1. 7.385.000.000		14. 1.1.1. 7.385.000.000	
15. 1.1.1. 7.385.000.000		15. 1.1.1. 7.385.000.000	
16. 1.1.1. 7.385.000.000		16. 1.1.1. 7.385.000.000	
17. 1.1.1. 7.385.000.000		17. 1.1.1. 7.385.000.000	
18. 1.1.1. 7.385.000.000		18. 1.1.1. 7.385.000.000	
19. 1.1.1. 7.385.000.000		19. 1.1.1. 7.385.000.000	
20. 1.1.1. 7.385.000.000		20. 1.1.1. 7.385.000.000	
21. 1.1.1. 7.385.000.000		21. 1.1.1. 7.385.000.000	
22. 1.1.1. 7.385.000.000		22. 1.1.1. 7.385.000.000	
23. 1.1.1. 7.385.000.000		23. 1.1.1. 7.385.000.000	
24. 1.1.1. 7.385.000.000		24. 1.1.1. 7.385.000.000	
25. 1.1.1. 7.385.000.000		25. 1.1.1. 7.385.000.000	
26. 1.1.1. 7.385.000.000		26. 1.1.1. 7.385.000.000	
27. 1.1.1. 7.385.000.000		27. 1.1.1. 7.385.000.000	
28. 1.1.1. 7.385.000.000		28. 1.1.1. 7.385.000.000	
29. 1.1.1. 7.385.000.000		29. 1.1.1. 7.385.000.000	
30. 1.1.1. 7.385.000.000		30. 1.1.1. 7.385.000.000	
31. 1.1.1. 7.385.000.000		31. 1.1.1. 7.385.000.000	
32. 1.1.1. 7.385.000.000		32. 1.1.1. 7.385.000.000	
33. 1.1.1. 7.385.000.000		33. 1.1.1. 7.385.000.000	
34. 1.1.1. 7.385.000.000		34. 1.1.1. 7.385.000.000	
35. 1.1.1. 7.385.000.000		35. 1.1.1. 7.385.000.000	
36. 1.1.1. 7.385.000.000		36. 1.1.1. 7.385.000.000	
37. 1.1.1. 7.385.000.000		37. 1.1.1. 7.385.000.000	
38. 1.1.1. 7.385.000.000		38. 1.1.1. 7.385.000.000	
39. 1.1.1. 7.385.000.000		39. 1.1.1. 7.385.000.000	
40. 1.1.1. 7.385.000.000		40. 1.1.1. 7.385.000.000	
41. 1.1.1. 7.385.000.000		41. 1.1.1. 7.385.000.000	
42. 1.1.1. 7.385.000.000		42. 1.1.1. 7.385.000.000	
43. 1.1.1. 7.385.000.000		43. 1.1.1. 7.385.000.000	
44. 1.1.1. 7.385.000.000		44. 1.1.1. 7.385.000.000	
45. 1.1.1. 7.385.000.000		45. 1.1.1. 7.385.000.000	
46. 1.1.1. 7.385.000.000		46. 1.1.1. 7.385.000.000	
47. 1.1.1. 7.385.000.000		47. 1.1.1. 7.385.000.000	
48. 1.1.1. 7.385.000.000		48. 1.1.1. 7.385.000.000	
49. 1.1.1. 7.385.000.000		49. 1.1.1. 7.385.000.000	
50. 1.1.1. 7.385.000.000		50. 1.1.1. 7.385.000.000	
51. 1.1.1. 7.385.000.000		51. 1.1.1. 7.385.000.000	
52. 1.1.1. 7.385.000.000		52. 1.1.1. 7.385.000.000	
53. 1.1.1. 7.385.000.000		53. 1.1.1. 7.385.000.000	
54. 1.1.1. 7.385.000.000		54. 1.1.1. 7.385.000.000	
55. 1.1.1. 7.385.000.000		55. 1.1.1. 7.385.000.000	
56. 1.1.1. 7.385.000.000		56. 1.1.1. 7.385.000.000	
57. 1.1.1. 7.385.000.000		57. 1.1.1. 7.385.000.000	
58. 1.1.1. 7.385.000.000		58. 1.1.1. 7.385.000.000	
59. 1.1.1. 7.385.000.000		59. 1.1.1. 7.385.000.000	
60. 1.1.1. 7.385.000.000		60. 1.1.1. 7.385.000.000	
61. 1.1.1. 7.385.000.000		61. 1.1.1. 7.385.000.000	
62. 1.1.1. 7.385.000.000		62. 1.1.1. 7.385.000.000	
63. 1.1.1. 7.385.000.000		63. 1.1.1. 7.385.000.000	
64. 1.1.1. 7.385.000.000		64. 1.1.1. 7.385.000.000	
65. 1.1.1. 7.385.000.000		65. 1.1.1. 7.385.000.000	
66. 1.1.1. 7.385.000.000		66. 1.1.1. 7.385.000.000	
67. 1.1.1. 7.385.000.000		67. 1.1.1. 7.385.000.000	
68. 1.1.1. 7.385.000.000		68. 1.1.1. 7.385.000.000	
69. 1.1.1. 7.385.000.000		69. 1.1.1. 7.385.000.000	
70. 1.1.1. 7.385.000.000		70. 1.1.1. 7.385.000.000	
71. 1.1.1. 7.385.000.000		71. 1.1.1. 7.385.000.000	
72. 1.1.1. 7.385.000.000		72. 1.1.1. 7.385.000.000	
73. 1.1.1. 7.385.000.000		73. 1.1.1. 7.385.000.000	
74. 1.1.1. 7.385.000.000		74. 1.1.1. 7.385.000.000	
75. 1.1.1. 7.385.000.000		75. 1.1.1. 7.385.000.000	
76. 1.1.1. 7.385.000.000		76. 1.1.1. 7.385.000.000	
77. 1.1.1. 7.385.000.000		77. 1.1.1. 7.385.000.000	
78. 1.1.1. 7.385.000.000		78. 1.1.1. 7.385.000.000	
79. 1.1.1. 7.385.000.000		79. 1.1.1. 7.385.000.000	
80. 1.1.1. 7.385.000.000		80. 1.1.1. 7.385.000.000	
81. 1.1.1. 7.385.000.000		81. 1.1.1. 7.385.000.000	
82. 1.1.1. 7.385.000.000		82. 1.1.1. 7.385.000.000	
83. 1.1.1. 7.385.000.000		83. 1.1.1. 7.385.000.000	
84. 1.1.1. 7.385.000.000		84. 1.1.1. 7.385.000.000	
85. 1.1.1. 7.385.000.000		85. 1.1.1. 7.385.000.000	
86. 1.1.1. 7.385.000.000		86. 1.1.1. 7.385.000.000	
87. 1.1.1. 7.385.000.000		87. 1.1.1. 7.385.000.000	
88. 1.1.1. 7.385.000.000		88. 1.1.1. 7.385.000.000	
89. 1.1.1. 7.385.000.000		89. 1.1.1. 7.385.000.000	
90. 1.1.1. 7.385.000.000		90. 1.1.1. 7.385.000.000	
91. 1.1.1. 7.385.000.000		91. 1.1.1. 7.385.000.000	
92. 1.1.1. 7.385.000.000		92. 1.1.1. 7.385.000.000	
93. 1.1.1. 7.385.000.000		93. 1.1.1. 7.385.000.000	
94. 1.1.1. 7.385.000.000		94. 1.1.1. 7.385.000.000	
95. 1.1.1. 7.385.000.000		95. 1.1.1. 7.385.000.000	
96. 1.1.1. 7.385.000.000		96. 1.1.1. 7.385.000.000	
97. 1.1.1. 7.385.000.000		97. 1.1.1. 7.385.000.000	
98. 1.1.1. 7.385.000.000		98. 1.1.1. 7.385.000.000	
99. 1.1.1. 7.385.000.000		99. 1.1.1. 7.385.000.000	
100. 1.1.1. 7.385.000.000		100. 1.1.1. 7.385.000.000	

Gambar 7. Transparansi anggaran yang dilakukan oleh Kepala Desa



Gambar 9. Jalan Desa yang dibangun dari Dana Desa

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pelatihan ini sangat membantu bagi masyarakat dan perangkat desa untuk membuat perencanaan secara partisipatif, sehingga semua dilakukan secara transparan. Masyarakat juga bisa melakukan monitoring dan evaluasi tentang bangunan yang telah dibangun. Pelatihan ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memelihara apa yang telah dibangun karena mereka terlibat dalam proses perencanaannya. Kades telah melakukan perencanaan secara transparan dan akuntabel.

Saran

Pelatihan ini perlu dilanjutkan pada desa-desa lain dalam rangka meningkatkan kapasitas masyarakat dalam perencanaan keuangan desa yang berbasis kebutuhan masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Ansari, B., *et al.*, 2013. Sustainable Entrepreneurship in Rural Areas. *Research Journal of Environmental and Earth Science Vol. 5 No. 1*: 26-31.
- Bachrein, S., 2010, Pendekatan Desa Membangun di Jawa Barat: Strategi Pembangunan dan Kebijakan Pembangunan Perdesaan. *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian Vol. 8 No. 2, Juni 2010*: 133-149.
- Beebe, James. 1995 "Basic Concepts and Techniques of Rapid Appraisal". *Human Organization*, vol. 54, No. 1, Spring.
- Chambers, R. 1996. *Participatory Rural Appraisal: Memahami Desa Secara Partisipatif*. Oxfam – Kanisius. Yogyakarta.
- Djohani, Rianingsih. 1996a. *Berbuat Bersama Berperan Setara*. Bandung: Driya Media.
- Gitosaputro, S. 2006. *Implementasi Participatory Rural Appraisal (Pra) Dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam. Lampung.
- Moeliono, Ilya dan Djohani Rianingsih. 1996. Kebijakan dan strategi menerapkan PRA dalam Pengembangan Program. Bandung: Driya Media.
- Prabowo, T.H.E., 2014, Developing BUMDes (Village-owned Enterprise) for Sustainable Poverty Alleviation Model Village Community Study in Bleberan-Gunung Kidul- Indonesia. *World Applied Sciences Journal 30 (Innovation Challenges in Multidisciplinary Research & Practice)*: 19-26.
- Mitchell, R.K., *et al.*, 1997, Toward a Theory of Stakeholder Identification and Salience: Defining the Principle of Who and What Really Counts. *The Academy of Management Review*, Vol. 22, No. 4: 853-886.